

Judul : Intan Fauzi Anggota Komisi VI DPR, Kasihan Lihat Ibu-ibu Antre Minyak Goreng
Tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

INTAN FAUZI
Anggota Komisi VI DPR

Kasihan Lihat Ibu-ibu Antre Minyak Goreng



Bereskan dulu tata niaga pangannya, karena akar permasalahannya itu di hulu. Yang mesti diselesaikan itu di hulu dan ketersediaan barangnya.



Bagaimana tanggapan Anda mengenai permasalahan minyak goreng yang hingga saat ini belum terselesaikan?

Kalau bicara soal minyak goreng (migor), terakhir itu Kemendag akan menyiapkan 1,2 miliar liter dalam waktu 6 bulan. Diharapkan, harganya bisa terkendali. Kenyataannya bukan harga saja yang masih mahal, tapi juga terjadi kekosongan barang.

Jika memang 1,2 miliar liter tersalurkan, seharusnya tidak terjadi kelangkaan ya?

Itu yang kita pertanyakan. Minyak goreng sebanyak 1,2 miliar liter ini ada atau tidak. Kalau terdistribusi secara merata, tentu tidak akan terjadi seperti sekarang. Ibu-ibu pada ngantre. Kalau ada pembelian, dibatasi.

Kenapa di lapangan stoknya tipis?

Itulah, kita tidak tahu datanya mana dan yang sudah tersalurkan berapa. Kita tidak tahu sampai saat ini.

Lantas, apa yang harus dilakukan Pemerintah?

Bereskan dulu tata niaga pangannya, karena akar permasalahannya itu di hulu. Yang mesti diselesaikan itu di hulu dan ketersediaan barangnya.

Berikutnya, apakah ketentuan Permendag Nomor 62 Tahun 2022 benar berjalan atau tidak. Kalau DMO (*Domestic Market Obligation*) berjalan, saya rasa permasalahan minyak goreng ini bisa diatasi.

Tapi, Mendag curiga ada penimbunan minyak goreng. Gimana tuh?

Permasalahan ini terjadi dari tahun ke tahun. Kalau kita bicara Satgas Pangan, mereka juga sudah bekerja. Intinya, kita jangan bicara penimbunan dan sebagainya. Kalau penimbunan, bicaranya sudah melebar.

Kalau ada unsur pidananya, sudah ditangani Satgas Pangan dan Kepolisian. Lebih baik bicara masalah minyak goreng di hulu daripada soal

penimbunan. Kalau penimbunan, ini soal lain.

Bagaimana dengan sikap tegas mau melibatkan polisi?

Itu satu hal lain. Kalau soal kejahatan, memang ranahnya kepolisian. Bukan kementerian.

Bagaimana agar permasalahan minyak goreng ini selesai dan tak terulang?

Sebagai mitra, saya berharap Kemendag betul-betul serius menangani masalah minyak goreng. Karena ini kebutuhan masyarakat, dan pada kenyataannya di lapangan itu barang kosong.

Kalaupun ada, barangnya terbatas, sehingga terjadi antrian panjang dan warga berebut. Kasihan melihatnya kalau berebut seperti itu.

Pesan Anda?

Selesaikan. Ini sudah mau Ramadan dan Lebaran. Kasihan rakyat. Kasihan lihat ibu-ibu ngantre minyak goreng. ■ REN